



**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN
PADA
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BERSAMA
TENTANG
JUKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK
AKSES DATA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, KOTA
MEDAN, KOTA SIBOLGA DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
27 SEPTEMBER 2012**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati GUBSU/Sekda Sumatera Utara; H. Nurdin Lubis, SH, MM

Yang kami hormati Walikota Medan Bapak Drs. Rohudman Harahap, MM

Yang kami hormati Walikota Sibolga, Bapak HM. Syafri Hutauruk

Yang kami hormati Bupati Humbahas Bapak Drs. Madin Sihombing Msi

*Yang kami hormati Para Sekretaris Daerah, Kepala DPKKAD, Kepala
Biro/Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara, Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten
Humbang Hasundutan ;*

Yang kami hormati Bapak/ibu dan hadirin yang berbahagia.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan mengikuti acara penandatanganan **Keputusan Bersama tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data** yang selanjutnya akan kami sebut JUKNIS Akses Data.

Bapak/ibu dan Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tidak terhingga, karena Bapak/Ibu dan hadirin sekalian telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami pada hari ini.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota KB tentang pengembangan sistem informasi untuk akses (*e-audit*) oleh Ketua BPK dan 34 Kepala daerah pada tanggal 12 Juli 2012 yang lalu.

Hari ini kami menyelenggarakan dua agenda sekaligus, yaitu yang ***pertama*** adalah penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis untuk akses data, antara BPK dengan empat pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan acara yang kedua adalah pembahasan draf KB tentang JUKNIS akses data dengan 21 pemerintah daerah.

Kami sengaja mengemas dua acara ini menjadi satu karena sebelum dilakukan penandatanganan KB tentang JUKNIS ini, kami akan menayangkan proses penarikan data oleh BPK tersebut, untuk kita saksikan bersama, baik oleh empat Pemerintah Daerah akan menandatangani KB tentang JUKNIS akses data maupun pemerintah daerah yang akan menyusul untuk menyusun JUKNIS dimaksud. Untuk demo ini kami mengambil contoh Kota Medan dan tentu saja untuk keperluan ini kami telah meminta izin Bapak Walikota Medan melalui Inspektorat Kota Medan.

Bapak/ibu dan Hadirin yang kami hormati,

Penyusunan JUKNIS akses data ini harus kami lakukan secara bertahap karena jumlah entitas di Sumatera Utara sangat banyak. Untuk tahap pertama telah kita lakukan atas empat pemerintah daerah sebagaimana kami sebutkan di atas dan tahap berikutnya kami berharap bisa kita lakukan terhadap 21 entitas yang kami undang dan hadir pada hari ini.

Bapak/ibu dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan penyusunan JUKNIS tersebut, perlu kami sampaikan bahwa untuk dapat melakukan akses data, kita tidak bisa melakukan hanya dengan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Ketua BPK dan Para Kepala Daerah, karena Nota Kesepakatan Bersama tersebut baru mengatur secara umum tentang kesediaan pemerintah daerah atas penerapan system E-audit. NKB belum mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis data yang diperlukan BPK dan bisa disediakan oleh pemerintah daerah, prosedur pengarikan data dlsb. Untuk itu kita perlu Petunjuk Teknis secara tertulis yang kita sepakati bersama, yang nantinya akan dijadikan pedoman baik bagi BPK maupun bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan e-audit yang selanjutnya disebut sebagai Petunjuk Teknis.

Bapak/ibu dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini kegiatan pengumpulan data pemeriksaan masih dilakukan secara manual dan ketersediaan data entitas di BPK tidak selalu mutakhir, sehingga untuk mendapatkan data dimaksud diperlukan waktu yang relatif lama. Apalagi untuk wilayah Sumatera Utara dengan jumlah entitas yang cukup banyak dan kondisi geografi yang cukup luas, hal ini menimbulkan berbagai hambatan dan keterbatasan misalnya dari segi transportasi, akomodasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi yang ada, hambatan dan keterbatasan tersebut dicoba untuk diminimalisir, salah satunya dengan penerapan system e-audit. Karena dengan e-audit ini nantinya akan diciptakan suatu sinergi secara elektronik antara system informasi di BPK (*e-BPK*) dan system informasi milik entitas pemeriksaan (*e-auditee*), sehingga proses korespondensi dengan entitas pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus datang ke entitas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penerapan e-audit antara lain adalah meningkatkan efisiensi dan

efektifitas kegiatan pemeriksaan serta tersedianya pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam upaya terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Bapak Ketua dan Hadirin yang kami hormati

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada;

- Bapak Gubernur Sumatera Utara, Walikota Kota Medan, Walikota Sibolga dan Bupati Humbang Hasundutan yang telah bersedia untuk menyusun JUKNIS Akses Data dalam rangka penerapan e-auditi;
- Para pejabat/staf dari 21 pemerintah daerah yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk melakukan pembahasan tentang Keputusan Bersama tentang Akses Data;
- Para Undangan lainnya dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungannya demi terselenggaranya acara hari ini.

Selain itu kami tidak lupa untuk mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan.

Akhirnya dengan memohon Ridho Allah SWT, semoga apa yang kita rencanakan dan lakukan hari ini dapat memberi manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.